

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN  
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem)**

**I Putu Santika<sup>1\*</sup>, I Ketut Mustika<sup>1</sup>, Ni Luh Kuni Hari<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Triatma Mulya

\*e-mail: [putu.santika@triatma-mapindo.ac.id](mailto:putu.santika@triatma-mapindo.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah dan system pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus di Kabupaten Karangasem). Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif yaitu hubungan kausalitas antara kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah dan system pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Karangasem. Sebagai gambaran populasi adalah pegawai Organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Karangasem dengan total sampel yang digunakan sebanyak 90 orang yang terdiri dari 41 kasubag keuangan, 41 penata laporan keuangan dan 8 orang staf BPKAD di bidang akuntansi. Metode pengumpulan data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah melalui penyebaran kuisioner/angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis statistik kuantitatif dengan menggunakan model regresi liner berganda yang diselesaikan dengan SPSS (*Statistical Package for the Social Science*) for windows. Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan model regresi linear berganda menunjukkan bahwa: 1). Kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 2). Standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan 3). Sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Implikasi penelitian ini adalah a). Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. b) Standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. c) Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

***Kata Kunci : Pengaruh, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern***

### ABSTRACT

*This research was conducted to analyze the effect of human resource competence, government accounting standards and internal control systems on the quality of financial reports (a case study in Karangasem Regency). This research is an associative study, namely the causal relationship between human resource competence, government accounting standards and internal control systems on the quality of financial reports in Karangasem Regency. As an illustration of the population are employees of regional apparatus organizations (OPD) in Karangasem Regency with a total sample of 90 people consisting of 41 financial subdivisions, 41 financial statement administrators and 8 BPKAD staff in the accounting sector. The data collection method used in this study was through distributing questionnaires. The data analysis technique in this research is quantitative statistical analysis using multiple linear regression models that are solved by SPSS (Statistical Package for the Social Science) for windows. The results of hypothesis testing using multiple linear regression models indicate that: 1). Human resource competence has a positive and significant effect on the quality of financial reports. 2). Government accounting standards have a positive and significant effect on the quality of financial statements and 3). The internal control system has a positive and significant effect on the quality of the financial statements of the Karangasem Regency Government. The implications of this research are a). Human resource competence has a positive and significant effect on the quality of financial reports. b) Government accounting standards have a positive and significant effect on the quality of financial statements. c) The internal control system has a positive and significant effect on the quality of financial reports.*

**Keywords:** *Influence, Human Resource Competence, Government Accounting Standards, Internal Control System*

### PENDAHULUAN

Kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan disegala bidang. Pembangunan yang berhasil dirasakan oleh rakyat sebagai perbaikan taraf hidup pada segenap golongan masyarakat akan meningkatkan kesadaran mereka akan arti penting pembangunan dan mendorong masyarakat berperan aktif dalam pembangunan. Otonomi Daerah adalah hak,

wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang No. 23 tahun 2014). Salah satu bentuk kewenangan yang diberikan pemerintah secara penuh terhadap daerah otonom untuk mengelola daerahnya dalam berbagai aspek diantaranya adalah aspek keuangan berupa pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan salah satu perencanaan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dengan pemberian hak kepada daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki tetapi juga pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam mempertanggungjawabkan wewenang yang telah diberikan.

Bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. (Yaqin & Jatmiko, 2018). Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, dan dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan perencanaan, pemerintah daerah perlu membuat suatu laporan hasil pelaksanaan APBD untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Laporan

pertanggungjawaban menjadi salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan (Aditya & Surjono.W, 2017)

Laporan keuangan merupakan faktor penting bagi pemerintah yang harus diperhatikan dan merupakan sebuah media bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Karakteristik kualitatif dari informasi keuangan yang dihasilkan sangat penting bagi pemerintah agar informasi tersebut benar-benar bermanfaat bagi pengambilan suatu keputusan dan keputusan tersebut diharapkan dapat membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik. (Putri,et.al, 2017)

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan seringkali terjadi penyimpangan-penyimpangan yang banyak ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama melakukan pemeriksaan (*audit*) setiap tahunnya. Lemahnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan sistem pengendalian intern (SPI) menjadi faktor penyebab banyaknya penyimpangan yang menjadi bahan temuan BPK (Sudiarianti et.al,2015)

Hasil penilaian BPK dinyatakan dalam 4 (empat) bentuk

opini yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP) termasuk wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP-DPP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW) dan tidak memberikan pendapat (TMP). Representasi kewajaran dituangkan dalam bentuk opini dengan mempertimbangkan kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal (Indriasih, 2014).

Kabupaten Karangasem merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Bali yang dibentuk melalui Undang-Undang No 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 9 agustus 1958. Kabupaten Karangasem dalam pelaksanaan pemerintahannya telah berhasil menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Bali sebanyak 4 (empat) kali secara berturut-turut. Predikat tersebut diraih berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015-2018. Walaupun sudah meraih predikat WTP, akan tetapi masih terdapat catatan dari BPK atas temuan dari Laporan Hasil pemeriksaan atas Laporan

Keuangan Pemerintah daerah tersebut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2017, pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Kabupaten Karangasem yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum tertib
- 2) Nilai pasar hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diatur SK Bupati Karangasem Nomor 712/HK/2015 tidak relevan dengan harga jual di kuari.
- 3) Pemberian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) atas PBB-P2 dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) atas BPHTB tidak konsisten
- 4) Pembayaran tunjangan perumahan DPRD tidak sesuai ketentuan.

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, pokok-pokok ketidakpatuhan adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada Dinas Kesehatan tidak sesuai ketentuan
- 2) Terdapat kekurangan volume atas belanja modal pengadaan

gedung rawat inap RSUD Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2018, pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Kabupaten Karangasem yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum tertib
- 2) Kesalahan penganggaran atas realisasi belanja modal sebesar Rp. 1.697.207.000,00 dan belanja barang sebesar Rp. 69.593.927.350,00 pada Tahun Anggaran 2018

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, pokok-pokok ketidakpatuhan adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) atas PBB-P2 dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) atas BPHTB tidak konsisten
- 2) Dana jaminan reklamasi yang merupakan wewenang Pemerintah Provinsi Bali masih dikuasai Pemerintah Kabupaten Karangasem

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat diajukan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas

laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem?

- 2) Bagaimana pengaruh standar akuntansi pemerintah, terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem?
- 3) Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem?

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **Laporan Keuangan**

Laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah ( Laporan Keuangan

Pemerintah kabupaten Karangasem 2019)

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Pradono & Basukianto, 2015)

### **Kualitas Laporan Keuangan**

Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian adalah penyampaian laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun menggunakan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, Dapat dipahami

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seorang pegawai

yang berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dalam menyelesaikan kinerjanya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif. (Pujanira & Taman, 2017). Menurut Aruan (2003) dalam Fikri et al. (2015) Kompetensi aparatur pemerintah daerah berarti kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Kompetensi sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas demi keberhasilan organisasinya. Sedangkan menurut Sudiarianti et.al (2015) kompetensi SDM yang dimaksud adalah kemampuan yang dimiliki PPK-SKPD di lingkungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas jabatan dalam penatausahaan keuangan, dengan indikator pengetahuan, keterampilan dan perilaku.

### **Standar Akuntansi Pemerintahan**

Standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi ini yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan atas pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel sejalan dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan,

andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Rahmawati, Mustika, & Eka, 2018). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah

### **Sistem Pengendalian Intern**

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi: (1) Lingkungan

Pengendalian, (2). Penilaian Risiko, (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi, (5) Pemantauan Pengendalian Intern.

Penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah telah dilakukan dengan teknik analisis serta lokasi penelitian yang berbeda pula diantaranya.:

### **Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Penelitian mengenai pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya dilakukan oleh Saraswati & Budiasih (2019) di Kota Denpasar yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas laporan keuangan di pemerintah Kota Denpasar. Penelitian dengan hasil lain juga dilakukan oleh Inapty & Martiningsih (2016) di Nusa Tenggara Barat yang menyatakan bahwa kompetensi Aparatur tidak berpengaruh signifikan pada kualitas informasi laporan keuangan

### **Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Penelitian mengenai pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya dilakukan oleh

Sudiarianti et.al (2015) di Tabanan yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Sedangkan hasil lain didapat oleh Rahmah K. & Zulkifli (2018) di Kabupaten Gunung Kidul yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya dilakukan oleh Agustiawan & Rasmini (2016) di Kota Denpasar yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Sedangkan hasil lain didapat oleh Budiawan & Purnomo (2014) di Kabupaten/Kota Bogor yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah wilayah I Bogor Jawa Barat

### **METODE PENELITIAN**

#### **Disain Penelitian**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah, dan sistem

pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten karangasem. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif yaitu hubungan kausalitas antara kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten karangasem. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Variabel Bebas (X) yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini : Kompetensi Sumber Daya Manusia ( $X_1$ ), Standar Akuntansi Pemerintah ( $X_2$ ) dan Sistem Pengendalian Intern ( $X_3$ )
- 2) Variabel Terikat (Y) yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan(Y).

#### **Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono (2018). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Karangasem yang berjumlah 41 OPD yang terdiri sekretariat daerah, secretariat DPRD, Inspektorat daerah, RSUD, 24 dinas, 5 badan, dan 8 kecamatan.

Sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut Sugiyono (2018). Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu dan kesimpulannya yang diambil telah mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan serta yang mengerti dan mampu memberikan gambaran sesuai dengan tujuan penelitian, adapun sample penelitiannya adalah kasubag keuangan OPD , penata laporan keuangan OPD dan Pegawai bidang akuntansi,perbendaharaan dan anggaran di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan total sampel yang digunakan sebanyak 90 orang yag terdiri dari 41 kasubag keuangan, 41 penata laporan keuangan dan 8 orang staf BPKAD di bidang akuntansi

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Penelitian ini menemukan bahwa pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan adalah positif signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang

dipersepsikan dengan pengetahuan, keterampilan dan perilaku dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dipersepsikan dengan relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seorang pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dalam menyelesaikan kinerjanya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik pula. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia (pegawai) yang dimiliki seperti melalui pelatihan, baik itu berupa diklat dan bimbingan teknis (bimtek) dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas

### **Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Penelitian ini menemukan bahwa pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan adalah positif signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah yang dipersepsikan dengan standar akuntansi pemerintah yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang terdiri dari pernyataan standar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dipersepsikan

dengan relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami Standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, Penerapan standar akuntansi yang baik dan konsisten akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan dan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan dapat dihindari dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan

### **Pengaruh Sistem pengendalian intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Penelitian ini menemukan bahwa pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan adalah positif signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern yang dipersepsikan dengan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dipersepsikan dengan relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan semakin baiknya penerapan system pengendalian intern maka kualitas laporan keuangan juga semakin baik.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Karangasem yang menunjukkan setiap peningkatan kompetensi sumber daya manusia akan diikuti oleh meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Karangasem. Semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik pula
- 2) Standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Karangasem yang menunjukkan setiap peningkatan standar akuntansi pemerintah akan diikuti oleh meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Karangasem. Penerapan standar akuntansi yang baik dan konsisten akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan dan

kesalahan dalam penyajian laporan keuangan dapat dihindari dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan

- 3) Sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Karangasem yang menunjukkan setiap system pengendalian intern akan diikuti oleh meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Karangasem. Dengan semakin baiknya penerapan system pengendalian intern maka kualitas laporan keuangan juga semakin baik.

#### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka saran-saran yang diajukan adalah :

- 1) Bagi Peneliti selanjutnya, Perlu dikaji lebih dalam variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan, sehingga dimungkinkan memunculkan hasil penelitian lain apabila peneliti lain menambahkan variabel-variabel selain yang digunakan dalam penelitian ini.
- 2) Melihat pentingnya faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, pemerintah Kabupaten Karangasem dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan mengadakan pelatihan-pelatihan seperti diklat dan bimbingan teknis yang dapat

meningkatkan kualitas laporan keuangan

- 3) Standar Akuntansi Pemerintah agar diterapkan dengan baik dan benar dikarenakan penerapan ini menyebabkan peningkatan kualitas laporan keuangan
- 4) Sistem Pengendalian Intern agar dilaksanakan dengan baik dikarenakan penerapan ini menyebabkan peningkatan kualitas laporan keuangan
- 5) Diharapkan juga bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan sampel yang lebih besar dengan objek penelitian yang lebih luas misalkan di beberapa tempat/kota bahkan provinsi dalam cakupan wilayah yang lebih luas.

#### **REFERENSI**

- Aditya, O., & Surjono.W. (2017). Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *SIKAP Vol 2 No.1* , 49-62.
- Agustiawan, NT. & Rasmini, NK. (2016 ). Pengaruh Sistem Berbasis Akrua, TI, Dan SPIP Pada Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi SDM Sebagai Moderasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.10*, 3475-3500
- Budiawan, DA. & Purnomo, BS. (2014 ). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi

- Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Di Wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat), *Journal Riset Akuntansi dan Keuangan 2, (1)*, 276-288
- Fikri, M. Ali., Biana A.D & RR. Sri P.M. (2015). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Skpd-Skpd Di Pemprov. NTB). *Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara Medan*.
- Inapty, MAFBA & Martiningsih, RRSP (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 9 (1)*, 27-42
- Indriasih, D. (2014). The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting in Local Government. *Research Journal of Finance and Accounting Vol.5, No.20* , ISSN 2222-2847.
- Laporan Keuangan Pemerintah kabupaten Karangasem 2019
- Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan
- Pradono, F., & Basukianto. (2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada Skpd Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Vol.22 No.2* , 188-200.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Jurnal Nominal Volume VI Nomor2* , 14-28.
- Putri, I., Rahayu, S., & Nurbaiti, A. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Berbasis Akruar, Sistem Pengendalian Internal Dan Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *e-Proceeding of Management : Vol 4 No 2* , 1732-1739.
- Rahmah, K. & Zulkifli (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akruar Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- Kabupaten Gunung Kidul (Studi Empiris Pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul DIY). *Jurnal Kajian Bisnis Vol.26 No 2* , 113-130.
- Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA). Volume 20 Nomor 2* , 8-17.
- Saraswati, IGA Gita & Budiasih, IGAN (2019). Pengaruh Good Governance, Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Intern pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 27.3* , 2268-2292.
- Sudiaranti, N. M., Ulupui, I. A., & Budiasih, I. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII* .
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Yaqin, A., & Jatmiko, B. (2018). Kontribusi Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah : Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Biak Numfor. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol. 2 No. 1* , 1-10.